

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HAL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG

	A. Hak-Hak Narapidana Menurut Perundang-undangan.....	20
	B. Pengertian Remisi.....	30
	C. Dasar Hukum Remisi.....	33
	D. Maksud Dan Tujuan Pemberian Remisi.....	35
	E. Syarat-syarat Pengajuan Remisi.....	36
	F. Prosedur Pelaksanaan Remisi.....	45
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN POSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
	A. Sejarah Pidana Penjara.....	47
	B. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.....	54
	C. Proses Pemasyarakatan.....	60
	D. Pengertian Dan Asas Pembinaan.....	67
	E. Tahapan Pembinaan Narapidana.....	71
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN “PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I (DEWASA) TANGERANG”	
	A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I (dewasa) Tangerang.....	75

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap REMISI Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I (dewasa) Tangerang.....	84
C. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I (dewasa) Tangerang.....	91
D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul dalam Pelaksanaan Remisi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I (dewasa) Tangerang.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Preiden Tentang Remisi.

4. Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1999, tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, Tentang Organisasi Dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
12. Hasil Wawancara dengan STAP KPLP Tangerang.